

## PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA: MULTINATIONALITY DAN MANAJEMEN LABA

Teza Deasvery Falbo<sup>1</sup>

Amrie Firmansyah<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Pajak

<sup>2</sup> Politeknik Keuangan Negara STAN

amrie@pknstan.ac.id

### Abstract

*The increase in tax revenue in Indonesia to date is still insufficient to meet the target. In addition, an increase in tax revenue has not been accompanied by an increase in the tax ratio. The low tax ratio indicates the existence of tax avoidance practices in Indonesia. This study aims to examine the effect of multinationality and earnings management on tax avoidance. This study employs data and information on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) from 2013 up to 2015 from [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com). Using purposive sampling, the sample selected was 90 companies, so the number of samples in this study is 270 samples. The test method used in this study is multiple linear regression analysis of panel data. This study indicates that multinationality has a negative effect on tax avoidance, while earnings management has a positive effect on tax avoidance. This study indicates that the taxation authorities in Indonesia need to improve the capabilities related to earnings management by companies in detecting corporate tax avoidance practices.*

**Keywords** : earnings management; multinationality; tax avoidance

### Abstrak

Kenaikan penerimaan perpajakan di Indonesia sampai dengan saat ini masih belum cukup untuk memenuhi targetnya. Selain itu, peningkatan penerimaan pajak juga tidak dibarengi dengan peningkatan tax ratio. Rendahnya tax ratio menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh multinationality dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan data dan informasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015 yang bersumber dari [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com). Dengan menggunakan purposive sampling, sampel yang dipilih sebanyak 90 perusahaan, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 270 sampel. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda terhadap data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa multinationality berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa otoritas perpajakan di Indonesia perlu meningkatkan kemampuan terkait dengan manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam mendeteksi praktek penghindaran pajak oleh perusahaan.

Kata Kunci: manajemen laba, multinationality, penghindaran pajak

## Pendahuluan

Pajak merupakan bagian yang penting dalam penerimaan negara karena memiliki proporsi yang paling besar dalam penerimaan negara. Dalam peraturan perpajakan di Indonesia diatur bahwa pencapaian target penerimaan pajak menjadi hal yang penting untuk memastikan terpenuhinya fungsi pajak tersebut demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), sejak tahun 2004 s.d. 2015, penerimaan pajak secara nominal mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Selain itu, proporsi penerimaan pajak dalam APBN juga meningkat dari tahun ke tahun, sehingga pemerintah semakin mengandalkan penerimaan pajak dalam memperoleh sumber penerimaannya.

Namun, berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2002 s.d. 2015, Pemerintah masih sulit untuk mencapai target penerimaan dari sektor perpajakan. Selain itu, peningkatan jumlah nominal penerimaan pajak juga tidak diikuti oleh peningkatan *tax ratio* yang masih relatif rendah. Bahkan, *tax ratio* Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan *tax ratio* di beberapa negara tetangga dan Asia (Prasetyo, 2014). Rasio tersebut digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak di suatu negara. Byrnes & Lavelle (2003) menyatakan bahwa penghindaran pajak menyebabkan turunnya penerimaan pajak di Amerika Serikat. Cobham (2005) menemukan bahwa total kerugian akibat adanya *tax evasion* dan *tax avoidance* bagi negara-negara berkembang

mencapai USD 385 milyar yang menyebabkan rendahnya *tax ratio*. Terkait dengan hal tersebut, *tax ratio* yang rendah di Indonesia dapat mencerminkan adanya penghindaran pajak, sehingga dimungkinkan masih terdapat potensi penerimaan pajak dengan jumlah yang lebih besar. Selain itu, indikasi adanya penghindaran pajak di Indonesia diperkuat dengan banyaknya Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang melakukan usahanya di Indonesia tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan di Indonesia. Walaupun perusahaan-perusahaan tersebut terus-menerus mengalami kerugian, namun perusahaan-perusahaan tersebut masih terus beroperasi dan bahkan melakukan ekspansi (<http://mediaindonesia.com>).

Penghindaran pajak merupakan aktivitas yang mengurangi nominal pajak secara eksplisit dari pendapatan sebelum pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Wenzel (2002) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan cara yang sah secara hukum dalam memanfaatkan peraturan perpajakan untuk memperoleh keuntungan tersendiri dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pandangan tradisional dan kontemporer (Desai & Dharmapala, 2009). Pandangan tradisional mendefinisikan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer merupakan bentuk pengamanan kekayaan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak, sedangkan pandangan kontemporer menganggap penghindaran pajak sebagai bentuk *rent extraction*, yaitu penghindaran pajak yang dilakukan manajer ditujukan untuk kepentingan

pribadi bukan untuk memaksimalkan kepentingan pemilik perusahaan.

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara menahan laba maupun mengalihkan laba ke luar negeri (Taylor & Richardson, 2012). Taylor & Richardson (2012) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa Australia memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak melalui aktivitas internasional. Di Indonesia, menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdapat peningkatan Wajib Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) yang melaporkan rugi pada Surat Pemberitahuan (SPT) pada periode tahun 2012 sampai dengan 2015, padahal perusahaan-perusahaan tersebut masih terus beroperasi dan bahkan melakukan ekspansi (<http://mediaindonesia.com>).

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penghindaran pajak dengan cara mengalihkan penghasilannya ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan Prasetyo (2014), yang menyebutkan bahwa perusahaan multinasional kerap memperoleh insentif perpajakan dari negara-negara berkembang, namun kemudian mengalihkan penghasilannya ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah dengan tujuan untuk menghindari pajak. Indikasi adanya pengalihan penghasilan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk menghindari pajak diperkuat dengan banyaknya perusahaan-perusahaan Indonesia yang tersangkut kasus *panama paper* (<http://fajar.co.id>). *Panama papers* merupakan kumpulan dokumen rahasia yang dibuat oleh perusahaan penyedia jasa keuangan asal

Panama, Mossack Fonseca. Perusahaan ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan terbesar di dunia dan membantu nasabah lembaga keuangan tersebut untuk membangun struktur keuangan yang rumit sehingga petugas pajak dan penyidik sulit melacak arus uang dari satu tempat ke tempat lain (Hamilton, 2016). Pernyataan tersebut diperkuat dengan status Panama yang merupakan salah satu *tax haven* menurut Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (OECD, 2006).

Penghindaran pajak merupakan tindakan dari manajemen yang dilakukan untuk menurunkan beban pajak akibat adanya kewajiban perusahaan kepada pemerintah. Penghindaran pajak tersebut dilakukan oleh manajer dengan memanfaatkan celah dalam standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan. Pemerintah mengharapkan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih besar dari perusahaan, namun manajer mungkin memiliki motif tertentu dalam melakukan perencanaan pajak melalui tindakan penghindaran pajak. Adanya perbedaan kepentingan antara manajer dalam perusahaan dan pemerintah, mengakibatkan ulasan penghindaran pajak perlu untuk diinvestigasi lebih lanjut.

Arham et al. (2020) telah melakukan pemetaan penelitian yang menguji penghindaran pajak di Indonesia. Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang biasa digunakan untuk menguji penghindaran pajak di Indonesia. Pengujian ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dilakukan di antaranya Kurniasih & Sari (2013),

Ngadiman & Puspitasari (2014), Dewinta & Setiawan (2016) Puspita & Febrianti (2017), Permata et al. (2018), dan Fitria & Handayani (2019). Selain itu, kepemilikan institusional digunakan dalam pengujian terhadap penghindaran pajak oleh Ngadiman & Puspitasari (2014), Sandy & Lukviarman (2015), Diantari & Ulupu (2016), Waluyo (2017), Mulyani et al. (2018). Pengujian komite audit terhadap penghindaran pajak digunakan oleh Sandy & Lukviarman (2015), Diantari & Ulupu (2016), Utami & Syafiqurrahman (2017), Mulyani et al. (2018), Fitria & Handayani (2019). Pengujian penghindaran pajak lainnya dilakukan dengan leverage (Dewinta & Setiawan, 2016; Mulyani et al., 2017; Permata et al., 2018), komisaris independen (Sandy & Lukviarman, 2015; Diantari & Ulupu, 2016; Mulyani et al., 2018; Fitria & Handayani, 2019). Selain itu, Arham et al. (2020) menginvestigasi terdapat faktor-faktor pengujian lainnya terhadap penghindaran pajak yang masing jarang digunakan di Indonesia yang terdapat dalam jurnal terakreditasi Sinta seperti manajemen laba, multinationality, political connection, thin capitalization.

Pengujian penghindaran pajak dengan *political connection* telah dilakukan oleh Ferdiawan & Firmansyah (2017), *thin capitalization* oleh Falbo & Firmansyah (2018). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh multinationality dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan di antaranya *multinationality*, *transfer pricing*, *aggressiveness*, dan *thin*

*capitalization* merupakan bagian dari *income shifting incentives* (Taylor & Richardson, 2012; Richardson & Taylor, 2015). Perusahaan multinasional pada umumnya menerapkan perencanaan pajak yang efisien untuk keseluruhan grup perusahaan sehingga dimungkinkan perusahaan dengan anak perusahaan yang mendapat penghasilan dari luar negeri untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak yang lebih besar (Taylor dan Richardson, 2012). Hanlon *et al.* (2007) melaporkan bahwa di Amerika Serikat, perusahaan yang dikendalikan asing melakukan ketidakpatuhan pajak lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan perusahaan domestik. Selanjutnya, Rego (2003) dan Dyreng *et al.* (2008) menemukan bahwa perusahaan yang menerima *international exposure* memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak akibat adanya perbedaan tarif dan peraturan perpajakan.

Faktor berikutnya yang juga mempengaruhi penghindaran pajak adalah manajemen laba (Frank *et al.*, 2009). Manajemen laba merupakan langkah manajemen untuk menaikkan atau menurunkan laba akuntansi, baik dengan cara yang melanggar maupun tidak melanggar prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku secara umum (Frank *et al.*, 2009). Shackelford & Shevlin (2001) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kebijakan pelaporan pajak dengan pelaporan keuangan. Penelitian tersebut menemukan adanya *trade-off* yang dihadapi manajer dalam menentukan kebijakan pelaporan laba secara fiskal dan akuntansi. Erickson *et al.* (2004)

menyimpulkan bahwa beberapa perusahaan bersedia untuk membayar pajak lebih dengan melaporkan laba akuntansi yang lebih tinggi. Namun, penelitian lainnya memperlihatkan bahwa *trade-off* antara pelaporan pajak dan pelaporan keuangan tidak selalu terjadi. Frank *et al.* (2009) menemukan bahwa terdapat kecenderungan bahwa perusahaan mampu melaporkan laba yang lebih besar pada laporan keuangan dan pada yang sama memiliki beban pajak yang lebih rendah. Perbedaan antara standar akuntansi keuangan dan aturan perpajakan mampu memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengelola laba akuntansi yang lebih besar dan laba fiskal yang lebih rendah pada periode pelaporan yang sama. Di Indonesia, penelitian terkait hal ini dilakukan oleh Ridha & Martani (2014), Kamila & Martani (2014) dan Pajriansyah & Firmansyah (2017) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini mengukur penghindaran pajak dengan menggunakan *Abnormal Book-Tax Difference* yang dikembangkan oleh Tang & Firth (2011). *Multinationality* diukur dengan variabel dummy berdasarkan penelitian Devi & Martani (2014) dan sejalan dengan Taylor & Richardson (2013), nilai 1 diberikan apabila terdapat setidaknya satu *subsidiary* di luar negeri, dan 0 apabila tidak. *Earnings management* diukur menggunakan proksi *discretionary accrual*, sesuai dengan model yang dikembangkan oleh Kothari *et al.* (2005). Selain itu, untuk menghilangkan bias yang mungkin timbul dalam model regresi, penelitian ini

memasukkan variabel kontrol yaitu *ukuran perusahaan*, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *profitabilitas*.

### Pengembangan Hipotesis

Dalam teori akuntansi positif, perusahaan lebih memilih untuk menghindari biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan (Watts & Zimmerman, 1990), seperti adanya kewajiban perpajakan perusahaan kepada perusahaan. Perusahaan multinasional pada umumnya menerapkan perencanaan pajak yang efisien untuk seluruh grup perusahaan sehingga dimungkinkan perusahaan dengan anak perusahaan yang mendapat penghasilan dari luar negeri untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak yang lebih besar (Taylor & Richardson, 2012). Taylor & Richardson (2012) menemukan bahwa *multinationality* merupakan variabel yang berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Hanlon *et al.* (2007) menyimpulkan bahwa perusahaan yang dikendalikan asing melakukan ketidakpatuhan pajak lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan perusahaan domestik. Selanjutnya, Rego (2003) dan Dyreng *et al.* (2008) menemukan bahwa perusahaan multinasional cenderung memiliki peluang dan kemampuan untuk mengurangi pajak terutang dibandingkan dengan perusahaan yang murni domestik. Secara khusus, perusahaan yang memiliki operasi di luar negeri yang menghasilkan lebih banyak laba dari luar negeri memiliki insentif dan cakupan yang lebih luas untuk melakukan penghindaran pajak (Dyreng *et al.*, 2008; Rego, 2003).

Gravelle (2015) menyatakan bahwa perusahaan multinasional

memiliki peluang untuk secara signifikan mengurangi pajak dengan cara beroperasi di yurisdiksi yang tarif pajaknya rendah, dengan cara mengalihkan laba dari yurisdiksi yang tarif pajaknya tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan peraturan perpajakan antar yurisdiksi dan mengalokasikan beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*) seperti beban bunga dan beban penelitian dan pengembangan. Sementara itu, Desai *et al.* (2006) menemukan bahwa perusahaan dengan eksposur internasional yang besar, transaksi intragrup yang ekstensif, dan penggunaan aset tak berwujud mempengaruhi penghindaran pajak secara positif. Perusahaan multinasional memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak karena beroperasi di berbagai wilayah negara dengan peraturan perpajakan dan tarif pajak yang berbeda-beda. Selain itu, perusahaan multinasional memiliki sumber daya yang lebih baik dalam pengelolaan pajak di berbagai negara. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: *multinationality* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Adanya biaya politik yang harus ditanggung oleh perusahaan mengakibatkan perusahaan cenderung untuk meminimalisasi biaya tersebut. Beban pajak yang erat kaitannya dengan biaya politik menjadi kendala bagi perusahaan dalam memperoleh laba yang lebih besar. Shackelford & Shevlin (2001) melakukan *literature review* yang memaparkan bahwa agresivitas pelaporan

keuangan dan agresivitas pelaporan pajak merupakan dua keputusan yang saling *trade-off*. Penelitian ini kemudian didukung oleh Erickson *et al.* (2004). Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Frank *et al.* (2009) menemukan hubungan positif antara pelaporan keuangan agresif dan pelaporan pajak agresif. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Kamila dan Martani (2014), dan Ridha & Martani (2014) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak bersamaan dengan manajemen laba karena manajemen laba akan mengubah penghasilan kena pajak yang nantinya mengubah beban pajak yang dibayarkan. Dengan demikian, maka hipotesis berikutnya adalah:

H<sub>2</sub>: *earnings management* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2015. Data diperoleh dengan cara mengunduh laporan tahunan dan laporan keuangan dari [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com). Sektor manufaktur dipilih sebagai populasi karena sektor tersebut merupakan sektor yang paling dominan dari keseluruhan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel

dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1 Pemilihan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Total	Ukuran
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	144	perusahaan
2	Perusahaan yang terdaftar di BEI yang <i>listing</i> dari tahun 2013 s.d. 2015	(13)	perusahaan
3	Perusahaan yang pembukuan dengan mata uang USD	(26)	perusahaan
4	Perusahaan dengan data tidak lengkap	(15)	perusahaan
Total Perusahaan yang dapat digunakan dalam Penelitian		90	Perusahaan
Tahun		3	Tahun
Total Observasi		270	Perusahaan-Tahun

Sumber: data diolah

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu penghindaran pajak, variabel independen yaitu, *multinationality*, dan *earnings management*, serta variabel kontrol yaitu *thin capitalization*, *transfer pricing aggressiveness*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *return on asset*. Penghindaran pajak sebagaimana Hanlon dan Heitzman (2010) didefinisikan sebagai aktivitas yang mengurangi nominal pajak secara

eksplisit dari pendapatan sebelum pajak. Variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Abnormal Book-Tax Difference* (ABTD) yang dikemukakan oleh Tang & Firth (2011) dan diperbaiki oleh Tang & Firth (2012), yang kemudian dimodifikasi oleh Sismi & Martani (2014) untuk penyesuaian dengan kondisi di Indonesia. ABTD didapat dari nilai residual dari persamaan berikut:

$$BTD_{it} = \beta_0 + \beta_1 \Delta INV_{it} + \beta_2 \Delta REV_{it} + \beta_3 TL_{it} + \beta_4 TLU_{it} + \beta_5 \Delta EB_{it} + \beta_6 BTD_{it-1} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- $BTD_{it}$  : *Book-tax difference* perusahaan i pada tahun t, selisih nilai laba akuntansi dengan laba pajak
- $\Delta INV_{it}$  : Perubahan *fixed asset* dan *intangible asset* perusahaan i pada tahun t
- $\Delta REV_{it}$  : Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t
- $TL_{it}$  : Jumlah kerugian akuntansi perusahaan i pada tahun t
- $TLU_{it}$  : Jumlah kompensasi kerugian perusahaan i pada tahun t
- $\Delta EB_{it}$  : Perubahan nilai imbalan kerja perusahaan i pada tahun t

$BTD_{it-1}$  : Nilai BTB pada tahun t-1, untuk memperhitungkan pengaruh perubahan standar akuntansi dan perpajakan dari tahun ke tahun pada NBTD

Kelebihan pengukuran menggunakan ABTD adalah model ini dapat memisahkan antara perbedaan laba akibat peraturan dengan komponen oportunistik yang dilakukan manajemen. Dalam model ini, BTB dibagi menjadi dua macam yaitu Normal BTB (NBTD) dan Abnormal BTB (ABTD). NBTD disebabkan oleh adanya perbedaan antara peraturan pajak dan standar akuntansi. Sedangkan ABTD, yang merupakan nilai residu dari model regresi untuk menghitung NBTD merupakan komponen oportunistik yang dilakukan manajemen (Tang & Firth, 2011). Semakin besar nilai ABTD mengindikasikan semakin besar penghindaran pajak perusahaan melalui komponen oportunistik yang dilakukan oleh manajemen.

Variabel *multinationality* menggambarkan bagaimana perusahaan

memanfaatkan *subsidiary* di negara lain untuk melakukan transaksi yang dapat mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. *Multinationality* dalam penelitian ini diukur dengan variabel dummy, 1 apabila terdapat setidaknya satu *subsidiary* di luar negeri, dan 0 apabila tidak. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran *multinationality* berdasarkan penelitian Devi & Martani (2014) dan sejalan dengan Taylor & Richardson (2013).

Manajemen laba merupakan kegiatan meningkatkan atau menurunkan laba perusahaan, baik sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (Frank *et al.*, 2009). Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi *discretionary accrual* menurut Kothari *et al.* (2005) sebagai berikut:

$$\frac{TACC_{it}}{TA_{it-1}} = \beta_1 \left( \frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{\Delta REV_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left( \frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 (ROA_{it-1}) + \varepsilon$$

Nilai variabel *Earnings Management* diperoleh dari residual persamaan TACC di atas. Nilai TACC didapatkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$TACC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

- TACC<sub>it</sub> : Total akrual perusahaan i pada tahun t
- NI<sub>it</sub> : Laba bersih perusahaan i pada periode ke t
- CFO<sub>it</sub> : Arus kas dari aktivitas operasi pada perusahaan i tahun t
- TA<sub>it-1</sub> : Total aset perusahaan i pada akhir tahun t-1
- ΔREV<sub>it</sub> : Perubahan laba perusahaan i pada tahun t
- PPE<sub>it</sub> : *Property, plant and equipment* perusahaan i pada tahun t
- ROA<sub>it-1</sub> : *Return on assets* perusahaan i pada akhir tahun t-1
- ε : Error

*Discretionary accrual* masing-masing perusahaan diperoleh dari residual persamaan di atas per tahun. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan enam variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan profitabilitas. Perusahaan yang semakin besar akan memiliki aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang semakin besar yang memberikan berbagai kesempatan untuk melakukan *tax avoidance* (Bernard *et al.*, 2006; Rego, 2003; Richardson *et al.*, 2013). Adanya biaya *tax avoidance* yang rendah yang harus dikeluarkan oleh perusahaan besar karena perusahaan besar telah mencapai skala ekonomis (Slemrod, 2001). Dalam penelitian ini, proksi ukuran perusahaan menggunakan logaritma natural (ln) dari total aset dengan nilai rupiah penuh, sesuai dengan Taylor dan Richardson (2012). *Capital intensity* berkaitan langsung dengan penghindaran pajak karena adanya percepatan pembebanan penyusutan berdasarkan masa manfaat aset (Taylor &

Richardson, 2012). Dalam penelitian ini *capital intensity* diukur dengan cara total nilai PPE di suatu tahun dibagi dengan total nilai aset di tahun sebelumnya. *Inventory intensity* dapat disebut sebagai substitusi untuk *capital intensity*. Oleh karena itu, *inventory intensity* akan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Taylor dan Richardson, 2012). Dalam penelitian ini *inventory intensity* diukur dengan cara total *inventory* di suatu tahun dibagi dengan total nilai aset di tahun sebelumnya. Richardson & Lanis (2007) menemukan bahwa profitabilitas dapat menurunkan penghindaran pajak. Profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA (*return on asset*) yaitu *pre-tax income* dibagi dengan total aset tahun sebelumnya.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda dengan data panel. Adapun, model penelitian adalah sebagai berikut:

$$ABTD_{it} = \alpha_{0it} + \beta_1MULTI_{it} + \beta_2EM_{it} + \beta_3SIZE_{it} + \beta_4CINT_{it} + \beta_5INVINT_{it} + \beta_6ROA_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- ABTD : Penghindaran pajak, menggunakan proksi *Abnormal BTD*  
 MULTI : Jumlah *related party* di luar negeri dibagi dengan total *related party*  
 EM : *Earnings management*, menggunakan proksi *discretionary accrual*  
 SIZE : Logaritma natural total aset  
 CAPINT : Net PPE dibagi dengan *lagged total asset*  
 INVINT : *Inventory* dibagi dengan *lagged total asset*  
 ROA : *Pre-tax income* dibagi total aset  
 $\alpha$  : Konstanta  
 $\varepsilon$  : Error

## Hasil Dan Pembahasan

Ikhtisar statistik deskriptif untuk seluruh variabel tercermin dalam Tabel 2.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	ABTD	MULTI	EM	CAPINT	INVINT	ROA	SIZE
Mean	-9.01E-18	0.274	-1.43E-17	0.405	0.233	0.093	28.142
Med.	-0.001	0.000	-0.011	0.364	0.210	0.055	27.913
Max.	0.146	1.000	1.665	1.479	0.728	1.369	33.134
Min.	-0.068	0.000	-0.549	0.001	0.000	-0.278	24.414
Std. Dev.	0.021	0.447	0.141	0.244	0.148	0.159	1.572
Obs.	270	270	270	270	270	270	270

Sumber: diolah

Berdasarkan hasil pengujian maka diperoleh model regresi data panel yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *fixed effect model*. Hasil

Tabel 3 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Var.	Coeff.	t-Stat.	Prob.	
C	-0.238	-2.751	0.003	***
MULTI	-0.004	-2.864	0.002	***
EM	0.013	3.449	0.000	***
SIZE	-0.002	-0.444	0.328	
CAPINT	-0.027	-2.601	0.005	***
INVINT	0.051	6.352	0.000	***
ROA	0.008	2.778	0.003	***
R2		0.934		
Adj. R2		0.898		
F-stat.		25.489		
Prob(F-stat.)		0.000		

Sumber: diolah

### 1. Pengaruh multinationality terhadap penghindaran pajak

Hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa *multinationality* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini berbeda dengan Taylor dan Richardson (2012) yang menemukan bahwa *multinationality* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di Australia, dan Rego (2003) yang menemukan bahwa *multinationality* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak di Amerika Serikat. Penelitian ini juga berbeda dengan Dewi & Jati (2014) yang menemukan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Perusahaan multinasional memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak karena beroperasi di lebih dari satu negara yang memiliki tarif dan peraturan perpajakan yang berbeda. Perusahaan multinasional dapat memanfaatkan perbedaan tersebut untuk mengefisienkan pajak penghasilan yang terutang, misalnya dengan melakukan pengalihan penghasilan (*income shifting*) ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Rego, 2003; Taylor dan Richardson, 2012). Namun, kondisi tersebut tidak berlaku untuk perusahaan multinasional yang berada di Indonesia. Perusahaan multinasional pada umumnya memiliki *prestige* dan *brand image* yang baik di negara-negara tempat beroperasi (David, 2011) sehingga

tindakan penghindaran pajak beresiko dapat merusak reputasi perusahaan apabila diketahui oleh otoritas perpajakan. Perusahaan yang ketahuan melakukan penghindaran pajak akan dianggap tidak etis dalam berbisnis sehingga akan mengurangi kepercayaan pelanggan dan *stakeholder* lainnya.

Selain itu, perusahaan multinasional juga seringkali mendapatkan insentif dari pemerintah (Prasetyo, 2014; Dewi & Jati, 2014). Insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong ekspor dan penghasilannya diharapkan kembali ke dalam negeri. Contoh insentif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Industri Tertentu. Dengan demikian, perusahaan multinasional tidak perlu lagi melakukan penghindaran pajak karena telah mendapatkan berbagai insentif dan kelonggaran dari pemerintah.

### 2. Pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian ini mengkonfirmasi hasil pengujian lainnya di Indonesia seperti Ridha & Martani (2014), Kamila & Martani (2014) dan Pajriansyah & Firmansyah (2017),

namun hasil pengujian ini tidak sejalan dengan Shackelford & Shevlin (2001) dan Erickson et al. (2004). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan dapat melakukan manajemen laba bersamaan dengan penghindaran pajak. Perusahaan melakukan praktik manajemen laba dengan memanfaatkan *discretionary accrual* dengan tujuan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara mengurangi laba fiskal.

Ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu menurunkan beban pajak dengan cara mengurangi besaran laba kena pajak, tidak akan menyebabkan *financial reporting costs* karena pendapatan yang dilaporkan menjadi tetap tinggi dan mengakibatkan persepsi kinerja perusahaan yang tetap baik. Penghindaran pajak dapat dilakukan bersamaan dengan manajemen laba karena perusahaan dapat memanfaatkan “*grey area*” dimana terdapat perbedaan antara aturan pajak dengan standar akuntansi (Frank et al., 2009). Pada area *conformity* (adanya kesamaan aturan pajak dan akuntansi), perusahaan tidak akan bisa menaikkan laba akuntansi sekaligus menurunkan laba pajak. Namun, pada area *non conformity* perusahaan dapat meningkatkan laba dan disaat yang bersamaan dapat menurunkan beban pajak.

### Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *multinationality* bukan

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan multinasional pada umumnya memiliki *prestige* dan *brand image* yang baik sehingga tindakan penghindaran pajak dapat beresiko merusak reputasi perusahaan. Selain itu, perusahaan multinasional juga seringkali mendapatkan insentif dari pemerintah sehingga perusahaan multinasional tidak perlu lagi melakukan penghindaran pajak karena telah mendapatkan insentif dari pemerintah. Sementara itu, perusahaan melakukan aktivitas manajemen laba untuk tujuan penghindaran pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen laba dapat dilakukan bersamaan dengan penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pengambilan sampel penelitian terbatas jangka waktunya, yaitu hanya menggunakan rentang waktu selama 3 (tiga) tahun (2013-2015) dengan jumlah perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 90 perusahaan dan dibatasi hanya perusahaan sektor manufaktur. Penelitian berikutnya dapat memperluas sampel perusahaan yang dipilih, tidak hanya sektor industri. Juga dapat menggunakan interval waktu yang lebih panjang untuk menghindari noise pada data. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran lain, misalnya untuk penghindaran pajak dapat menggunakan GAAP ETR,

current ETR, cash ETR, long-run cash ETR, ETR differential, DTAX, total BTD, temporary BTD, abnormal total BTD, UTB, tax shelter activity, dan marginal tax rate

Kedua, Multinationality dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy yang bernilai 1 apabila perusahaan memiliki setidaknya satu anak perusahaan di luar negeri, dan nilai 0 untuk sebaliknya. Pertimbangan menggunakan variabel dummy ini karena keterbatasan data yang diungkapkan dalam laporan keuangan sehingga tidak dapat menggunakan proksi yang lain. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi dengan skala rasio seperti misalnya proporsi penghasilan dari luar negeri dibagi dengan total penghasilan. Penggunaan skala rasio ini diharapkan dapat lebih akurat dalam menjelaskan variabel multinationality. Ketiga, manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan manajemen laba akrual yang diproksikan dengan modified jones model oleh Kothari (2005). Penelitian selanjutnya dapat menggunakan berbagai proksi lain dalam mengukur manajemen laba akrual. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai jenis manajemen laba selain yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa otoritas pajak dapat memfokuskan pengawasan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan

yang cenderung terindikasi melakukan *earnings management*. Oleh karena itu, pemeriksa pajak perlu memahami pola-pola manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan karena dari manajemen laba tersebut dapat diketahui indikasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

#### Daftar Pustaka

- Arham, A., Firmansyah, A., Nor, A. M. E., Vito, B. (2021). A bibliographic study on tax avoidance research in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24 (7), 9526-9554
- Bernard, A. B., Jensen, J. B., & Schott, P. K. (2006). Transfer pricing by US-based multinational firms. *NBER Working Paper Series*.
- Byrnes, L., & Lavelle, L. (2003). The Corporate Tax Game. *Bloomberg Business Week*. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2003-03-30/the-corporate-tax-game> (diakses 20 Maret 2019)
- Cobham, A. (2005). Tax evasion, tax avoidance and development finance. *QEH Working Paper Series*, 129(129), 1–20.
- Dahlby, B. (2008). *Taxation of outbound direct investment: economic principles and tax policy considerations. advisory panel on canada's system of international taxation*. Alberta. <https://www.fin.gc.ca/access/t-t-it/apcsit-gcrefi/pdf/RR9> - Dahlby - en - final -

- 090623.pdf (diakses 20 Maret 2019)
- David, F. R. (2011). *Strategic management: concepts and cases. 13<sup>th</sup> edition*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Earnings management and corporate tax shelters. *Harvard University*.
- Desai, M. A., Foley, C. F., & Hines, J. R. (2006). The demand for tax haven operations. *Journal of Public Economics*, 90(3), 513–531.
- Devi, C., & Martani, D. 2014. *Determinan praktik thin capitalization listed company di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XVII.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6.2, 249-260.
- Dewinta, I. A. R. & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1584-1613.
- Diantari, P. R. & Ulupu, I. G. K. A. (2016). Pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702-732.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. 2008. Long-run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.
- Erickson, M., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2004). How much will firms pay for earnings that do not exist? Evidence of taxes paid on allegedly fraudulent earnings. *The Accounting Review*, 79(2), 387–408
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 1(2), 1-28.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, Dan, Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 93-116.
- Fitria, G. N. & Handayani, R. (2019). Tax avoidance: studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi di Indonesia. *Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 8(1), 251-267.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84, 467–496.

- Gravelle, J. G. (2015). Tax havens: international tax avoidance and evasion. *Corporate and International Taxation: Analyses and Reforms*, 89–136.
- Hamilton, M. M. (2016). *Panamanian Law Firm Is Gatekeeper To Vast Flow of Murky Offshore Secrets*. <https://panamapapers.icij.org/20160403-mossack-fonseca-offshore-secrets.html> (diakses 25 Maret 2019)
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127–178.
- Hanlon, M., Mills, L. F., & Slemrod, J. B. (2007). An empirical examination of corporate tax noncompliance. *Taxing Corporate Income in the 21st Century*, 171–210.
- Kamila, P. A., & Martani, D. (2014). *Analisis hubungan agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak*. Simposium Nasional Akuntansi XVII.
- Khomsatun, S., & Martani, D. (2014). *Pengaruh thin capitalization dan asset mix perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) terhadap penghindaran pajak*. Simposium Nasional Akuntansi XVII.
- Kothari, S. P., Leone, A. J., & Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. *Journal of Accounting and Economics*, 39(1), 163–197.
- Kurniasih, T. & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58-66.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance (perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322-340.
- Ngadiman & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sektor manufaktur di BEI 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408-421.
- OECD. (2006). The OECD's Project on Harmful Tax Practices : 2006 Update on Progress in Member Countries.
- Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh leverage, kompensasi rugi fiskal dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. *Keberlanjutan*, 2(1), 431-459
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh size, age, profitability, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(1), 10-20.
- Prasetyo, Kristian Agung. 2014. *Quo Vadis Tax Ratio Indonesia?* <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12643-quo->

- vadis-tax-ratio-indonesia#\_ftn16 (diakses 25 Maret 2019)
- Puspita, D. & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 38-46.
- Rego, S. (2003). Tax Avoidance of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20, 805-833.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689-704.
- Richardson, G., & Taylor, G. (2015). Income shifting incentives and tax haven utilization: evidence from Multinational U.S. Firms. *International Journal of Accounting*, 50(4), 458-485.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms, 9(2), 136-150.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(3), 68-88.
- Ridha, M., & Martani, D. (2014). Analisis terhadap agresivitas pajak, agresivitas pelaporan keuangan, kepemilikan keluarga, dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVII
- Sandy, S. & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(2), 85-98.
- Shackelford, D. A., & Shevlin, T. (2001). Empirical tax research in accounting: A discussion. *Journal of Accounting and Economics*, 31(1-3), 389-403.
- Sismi, A. L., & Martani, D. (2014). Pengaruh perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak dan kepemilikan keluarga terhadap persistensi laba. Simposium Nasional Akuntansi XVIII.
- Slemrod, J. (2001). A general model of the behavioural response to taxation. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour dan Research*, 8, 119-128.
- Tang, T., & Firth, M. (2011). Can book-tax differences capture earnings management and tax Management? Empirical evidence from China. *International Journal of Accounting*, 46(2), 175-204.
- Tang, T., & Firth, M. 2012. Earning persistence and stock market reactions to the different information in book-tax

- difference: evidence from China. *The International Journal of Accounting*, 47(3), 369-397.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *The International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2013). The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22(1), 12–25.
- Utami, R. F. & Syafiqurrahman, M. (2017). Pengaruh organ-organ pendukung good corporate governance terhadap tax avoidance. *InFestasi: Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 13(2), 380-389.
- Waluyo. (2017). The effect of good corporate governance on tax avoidance: empirical study of the indonesian banking company. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 2(2), 1-10.
- Watt, R., & Zimmerman, J. (1990). Positive accounting theory: a ten year perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131-156.
- Wenzel, M. (2002). The impact of outcome orientation and justice concerns on tax compliance: the role of taxpayers' identity. *The Journal of applied psychology*, 87(4), 629–645.
- <http://mediaindonesia.com/news/read/42193/perusahaan-mengakurugi-tapi-terus-ekspansi-1/2016-04-25> (diakses 20 Maret 2019)
- <http://fajar.co.id/2016/04/05/heboh-bocoran-panama-papers-ada-43-nama-perusahaan-indonesia-yang-coba-manipulasi-pajak/> (diakses 25 Maret 2019)